

ABSTRAK

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang menghasilkan PNBK. Karena hal tersebut, pada tahun 2011 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.06/2011 yang mewajibkan BPFK Surabaya untuk melakukan perbaikan di bagian piutang dan penagihan yang pada saat itu belum memiliki tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern atas piutang dan penagihan piutang di BPFK Surabaya serta membandingkannya dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern BPFK Surabaya atas piutang dan penagihan piutang belum optimal karena BPFK Surabaya merupakan instansi yang berfokus pada pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, BPFK Surabaya memiliki tingkat kepatuhan regulasi yang tinggi tetapi SPIP belum dapat diterapkan, dan segala regulasi yang ada dalam tata kelola BPFK Surabaya harus diatur dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Kesehatan.

Kata kunci: Piutang, Sistem Pengendalian Intern, Regulasi Pemerintah